

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan apa yang tersebut dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bagian menimbang huruf (a) Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian,keselamatan dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan termasuk di sektor ekonomi dan keuangan. Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan yang telah di capai oleh Bangsa Indonesia disektor Ekonomi dan keuangan tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan peran serta banyak pihak dalam pelaksanaannya, termasuk di dalamnya yaitu pemerintah, masyarakat dan para pelaku bisnis salah satunya yaitu bank. Pada masa sekarang bank telah merasuk kedalam sendi kehidupan masyarakat.Bank dibutuhkan secara langsung maupun tidak langsung.untuk skala nasional maupun internasional. Bank yang banyak memberi kemudahan dan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.Ini ditegaskan pula dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 bagian menimbang huruf (b) bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan

dibidang ekonomi ,termasuk Perbankan. Pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu pula, dengan meningkatkan pembangunan nasional disegala bidang, maka dunia perbankan dituntut untuk lebih meningkatkan peranannya, baik dalam mobilisasi tabungan masyarakat maupun penyaluran dana untuk pembiayaan investasi. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pembangunan yang terus meningkat yang memang memerlukan dana yang semakin besar.

Tantangan dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya semakin besar,untuk itu Pemerintah bersama-sama lembaga perbankan terus memantapkan diri untuk menjawab tantangan tersebut. Pemerintah telah menempuh berbagai kebijaksanaan penyesuaian di sektor moneter dan perbankan, yang biasa disebut dengan deregulasi dan debirokratisasi. Kebijakan-kebijakkan yang dibuat oleh pemerintah disesuaikan dengan kondisi perbankan yang dialami, kondisi perbankan di Indonesia dapat di kelompokkan menjadi tiga periode. *pertama*, periode Undang-Undang No. 14/1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, *kedua* , Era Undang-Undang No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10/1998, *Ketiga* , adalah pasca krisis moneter 1997. Kebijakan tersebut telah ditempuh secara bertahap sesuai dengan keadaan dan perkembangan untuk mewujudkan suatu industri perbankan yang sehat, efisien dan tangguh.

Dampak resesi ekonomi dunia yang terasa dimana-mana tidak terkecuali juga di Indonesia mengakibatkan pemerintah mengambil tindakan penyelamatan demi kelangsungan pembangunan nasional. Berbagai langkah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah guna meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni penggalangan dan pergerakan berbagai macam potensi usaha. Dalam hal ini, peranan perbankan dalam pembangunan ekonomi Indonesia yakni melalui penggalangan dan pergerakan berbagai macam potensi usaha. Dalam hal ini, peranan perbankan dalam pembangunan ekonomi Indonesia di tuntut agar lebih aktif dan efektif untuk mendorong investasi, mendorong kewirausahaan dalam berbagai macam komoditi usaha.

Peranan yang diharapkan dari perbankan nasional berpengaruh kepada dunia perbankan yang memiliki fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional.

Untuk lebih meningkatkan peranan perbankan dalam pembangunan di Indonesia, maka pemerintah dalam hal ini mengeluarkan kebijaksanaan terhadap dunia perbankan, salah satunya yaitu pelaksanaan pemberian kredit. Berdasar Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengaturan pelaksanaan pemberian kredit oleh bank dikenal dengan sebutan *manajemen perkreditan bank*. Manajemen perkreditan bank adalah kegiatan mengatur pemanfaatan dana-dana bank, supaya produktif, aman, dan giro wajib minimalnya tetap sehat. Termasuk kegiatan didalamnya yaitu perencanaan, alokasi dan kebijaksanaan penyaluran kreditnya.

Pelaksanaan kredit yang diberikan oleh bank sangat berarti bagi masyarakat. Dengan adanya fungsi dan tujuan yang baik bagi masyarakat maka bank sebagai penyelenggara kredit menyediakan berbagai jenis kredit yang dibedakan menurut tujuan kegunaan ,jangka waktu,macam, sektor perekonomian, agunan, golongan ekonomi, serta penarikan dan pelunasan.

Kredit usaha bagi usaha kecil dan menengah termasuk ke dalam kredit yang produktif. Walaupun begitu, dalam setiap pelaksanaan kredit tetap terdapat tata cara pelaksanaan dan kendala-kendala yang dialami .Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat dan mengulas permasalahan tersebut dalam suatu bentuk skripsi dengan judul “ Pelaksanaan Pemberian Kredit Untuk Usaha Kecil Dan Menengah Di Bank SumselBabel Cabang Pangkalpinang.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit kepada nasabah yang memiliki sektor usaha kecil dan menengah di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang ?
2. Apakah hambatan-hambatan yang terjadi dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut ?

1.3 Batasan Masalah

Pengembangan Sistem adminitrasi kredit untuk usaha kecil dan menengah yang saya beragam yang belum terealisasi oleh Sistem utama pada Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang.

Dibutuhkan analisa, rancangan ,implementasi sistem yang sesuai dengan kebutuhan.

1.3.1 Sistem Berjalan

Nasabah mengajukan Kredit UKM Ke Bank Sumsel Babel, Yang Terima oleh AO (Accounting Officer).Setelah itu AO mengecek kelengkapan berkas, setelah itu melakukan survei.Setelah selesai survei dan disetujui maka akan di adakan komite,setelah komite AO dan Legal melakukan analisis Berkas Pengajuan KUKM.Baru akan Dilakukan pentandatanganan Akad Kredit setelah itu baru Pencairan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara atau tanya jawab langsung kepada staf-staf yang berkaitan dengan sistem yang sedang diteliti.

2) Pengamatan

Melakukan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data dengan melihat langsung, mengamati kegiatan yang sedang berjalan pada obyek yang sedang diteliti.

3) Kepustakaan

Penelitian dengan sumber-sumber kepustakaan. Dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber seperti buku-buku, bahan-bahan perkuliahan, artikel, jurnal, serta sumber informasi lainnya.

1.4.2 Analisa Sistem

Cara kerja yang sistematis untuk mengerjakan tahap analisis berdasarkan pendekatan objek. Ada kumpulan aturan-aturan tertentu yang harus diikuti untuk menyelesaikan pekerjaan analisis tersebut. Mempunyai urutan aktivitas, teknik, dan alat bantu (*tools*) tertentu untuk memodelkan (mendokumentasikan) hasil dari setiap aktivitas. Dengan

menggunakan beberapa diagram **UML** (*Unified Modelling Language*) dan diagram lainnya yaitu :

- 1) *Activity Diagram*
- 2) *Use Case Diagram*
- 3) Deskripsi *Use Case Diagram*
- 4) Analisa Dokumen Keluaran
- 5) Analisa Dokumen Masukan

1.4.3 Perancangan Sistem

Pada proses ini dapat diilustrasikan sebagai proses perancangan berorientasi objek dengan mengembangkan desain contoh untuk perangkat lunak kontrol yang menjadi satu dengan stasiun cuaca terotomasi. Proses yang akan dibahas di sini merupakan proses umum yang memakai kegiatan yang umum bagi sebagian besar proses OOD (objek-oriented design/perancangan berorientasi objek).

- 1) Entity Relationship Diagram (ERD).
- 2) Transformasi ERD ke LRS
- 3) Logical Record Structure (LRS)
- 4) Spesifikasi Basis Data
- 5) Rancangan Dokumen keluaran
- 6) Rancangan Dokumen Masukan
- 7) Rancangan Layar Program
- 8) *Sequence Diagram*
- 9) Class Diagram

1.5 Tujuan Penelitian

Peneliti memilih Judul tesis ini dengan tujuan untuk :

1. Mengkaji bagaimana pelaksanaan pemberian kredit terhadap usaha kecil dan menengah pada Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang.

2. Mengkaji hambatan-hmbatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit serta cara mengatasinya.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis bagi penulis sendiri maupun para pembaca skripsi ini, termasuk para pembimbing serta penguji.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar kajian-kajian ilmu dan penelitian yang di bahas dalam skripsi ini dapat menjadi sarana transfer pemikiran serta perbandingan dalam praktek pengembangan sistem informasi, terutama dalam pengkreditan usaha kecil dan menengah sehingga para pembaca dapat menghasilkan sistem informasi yang baik.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul penulisan hukum. Bab ini juga memaparkan perumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat yang ingin di capai dari tesis ini yang semuanya akan di tulis secara sistematis, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini mengenai kompilasi berbagai teori yang akan dijadikan dasar dalam melakukan penelitian yaitu mengenai sistem informasi dan analisis hasil penelitian yang akan di peroleh nanti. Penentuan teori tersebut berdasarkan pada variabel yang ada dalam judul tesis sehingga bab ini akan menjadi bahan

referensi dalam menyusun Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menggambarkan suatu saran pokok pengembangan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena suatu penelitian pengembangan sistem bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi untuk perancangan meliputi : Sistem, perancangan DFD, perancangan database (ERD) dan Implementasi.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai hasil uji coba penelitian sistem informasi penelitian di lapangan dan pembahasan yang menghubungkan fakta atau data yang di peroleh dari hasil penelitian pustaka dan atau penelitian lapangan tentang” Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang”.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang dapat di tarik yang mengacu pada hasil penelitian sesuai dengan perumusan masalah yang telah di tetapkan dan saran-saran yang akan lahir setelah pelaksanaan penelitian dan pengulasannya dalam skripsi di gunakan untuk mengembangkan sistem informasi. Selanjutnya akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran - lampiran yang berkaitan dengan skripsi ini.